

BALON ANGGOTA DPD DARI DIY

Tujuh Orang Penuhi Syarat Dukungan

YOGYA (KR) - Sebanyak tujuh bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DIY dinyatakan memenuhi syarat untuk status jumlah dukungan dan status sebaran dukungan untuk tingkat provinsi. Sedangkan, dua balon lainnya, baru memenuhi salah satu syarat saja.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY Hamdan Kurniawan dalam siaran pers yang diterima KR, Jumat (3/3) mengemukakan, pengumuman calon anggota DPD RI yang telah memenuhi syarat itu disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota DPD DIY pada Pemilu Tahun 2024, Rabu (1/3). Terdapat sembilan nama yang disampaikan dalam rapat berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi faktual kesatu.

Hamdan Kurniawan mengatakan rapat pleno dilaksanakan dengan kuorum dihadiri baik dari KPU mau-

pun Bawaslu DIY. Menurutnya, ada sembilan nama yang sebelumnya telah menyertakan syarat dukungan dan sebaran tingkat provinsi. Ada beberapa nama bakal calon yang belum memenuhi persyaratan dan diberi waktu untuk melengkapinya.

Perbaikan meliputi pemilih dan/atau sebaran dukungan pada tahapan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua dari tanggal 2-11 Maret 2023, untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua, dari 12-21 Maret 2023.

Nama calon dan status setelah verifikasi tahap pertama KPU DIY yakni Khudhori (memenuhi syarat),

Dr H Hilmy Muhammad MA (memenuhi syarat), Dr H Tugiman SH MS (memenuhi syarat), Drs Trisno Sunardi (memenuhi syarat), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (memenuhi syarat), Ir Ahmad Syaqui Soeratno (memenuhi syarat), Ir Cinde Laras Yulianto (belum memenuhi syarat untuk jumlah dukungan tingkat provinsi), RA Yashinta Sekarwangi Mega (memenuhi syarat) dan Sindu Kurniawan SE (belum memenuhi syarat untuk jumlah dukungan tingkat provinsi).

"Bagi yang belum memenuhi syarat bisa melakukan perbaikan. Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota DPD DIY pada Pemilu Tahun 2024, yang diserahkan kepada masing-masing Petugas Penghubung (LO) Bakal Calon Anggota DPD DIY dan Bawaslu DIY," jelas Hamdan. (Jon)-d

JELANG PANEN RAYA

HPP Gabah dan Beras Digodok Ulang

JAKARTA (KR) - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) mengumpulkan seluruh unsur perberasan nasional untuk menggodok ulang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras terbaru menjelang panen raya.

"Tadi sudah kami dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kita sudah kantong usulan-usulan angkanya," kata Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Jumat (3/3).

Arief menyampaikan, pertemuan yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan perberasan nasional baik dari kementerian dan lembaga, asosiasi dan organisasi petani serta pelaku usaha tersebut sangat penting. Pertemuan itu menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan

dalam penyerapan gabah petani. Pertemuan itu juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP yang berkeadilan. "Selanjutnya akan kami analisis setiap opsi, terutama terkait impactnya apabila opsi A, B, dan seterusnya diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat. Kita akan libatkan instansi terkait yang berkompeten untuk memberikan masukan," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut setiap perwakilan menyampaikan usulan besaran HPP Gabah Kering Panen (GKP) berdasarkan hasil perhitungan Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT). Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI)

mengusulkan HPP GKP Rp 5.700/kg. Sedangkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp 5.550/kg, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan Rp 5.600/kg, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan Rp 5.400/kg, Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp 5.800/kg, dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmas) mengusulkan Rp 5.375/kg. Sementara Kementerian turut mengusulkan HPP berada di kisaran Rp 4.800-Rp 5.100/kg dan BRIN mengusulkan harga GKP berkisar Rp 4.850-Rp 5.000/kg.

Menurut Arief, semua usulan akan diterima dan ditampung terlebih dahulu, setelah dianalisis selanjutnya akan dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi. (Ant/San)-f

MANGAYUBAGYA 34 TAHUN JUMENENGAN SULTAN HB X Menyejahterakan Masyarakat dan Menjadi Teladan

YOGYA (KR) - Memperingati Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X, Paniradya Kaistimewaan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY menggelar acara 'Mangayubagya 34 Tahun Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X', Selasa (7/3), pukul 13.00-16.00 di Pendapa Akademi Komunitas Seni Budaya Yogyakarta, Jalan Parangtritis No 364, Pandes, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Acara tersebut akan ditayangkan secara *live streaming* melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY.



KR-Istimewa
Aris Eko Nugroho SP Msi

Sebagaimana diketahui, Selasa Wage, 7 Maret 1989, KGPB Mangkubumi dinobatkan sebagai Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho SP Msi berharap, peringatan Jumenengan Sultan HB X tidak sekadar sebagai tradisi tapi juga disertai harapan dan doa, semoga Sultan HB X tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa menjadi panutan bagi kita semua, bisa hamengku, hamangku dan hamengkoni sesuai dengan harapan masyarakat di Yogya, tanpa membedakan satu orang dengan orang yang lain, berkeadilan dan juga dapat menyejahterakan masyarakat dan menjadi teladan bagi kita semua.

Selama 34 tahun Jumeneng sebagai Raja Kraton Yogyakarta dan juga Gubernur DIY, kepemimpinan Sultan HB X, menurut Aris, beliau sangat membuka diri untuk kemudian berdialog, berdiskusi, dan juga menghargai adanya perbedaan pendapat. "Bahkan kami

bisa berkembang, bisa mengembangkan ide, tentu saja dalam arahan yang beliau sampaikan," kata Aris mengenai kepemimpinan Sultan HB X.

"Sultan HB X juga menjadi bagian teladan bagi kami generasi muda untuk dapat menjadikan dirinya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di Yogya," lanjut Aris.

Mengenai pembangunan di DIY, Aris mengatakan, banyak mengenalkan simbol-simbol dan penanda. "Membangun tidak harus cantik tapi harus indah. Ini menjadi bagian berbeda, tidak sekadar mempercantik suatu wilayah tapi bagaimana menjadi indah," katanya.

Di Yogya, lanjut Aris, sudah ada inisiasi yang dilakukan oleh Sultan HB X, yang pertama berkaitan dengan pembangunan yang berada di Yogya. Apapun yang sudah dibangun oleh leluhur kita, mesti kita *mungguhke* (memuliakan). Jangan sampai kemudian yang sudah dibangun dari awal, ada filosofinya, tapi malah hilang.

"Bagaimana kita *mungguhke* (memuliakan) apa yang sudah ada dan tentu saja mengikuti kondisi kekinian,"

katanya. Salah satu contoh yang sudah dilakukan yaitu dengan danais, rumah yang tidak layak huni dibangun kembali dengan arsitektur gaya Yogya, di mana arsitektur gaya Yogya menjadi tujuan utama. Selain itu juga ada tujuan-tujuan lain dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat di Yogya.

Aris mengatakan, pembangunan di DIY perlu ada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun kelurahan dengan masyarakat. "Kita mengenal koordinasi kolaborasi sinergi 5K yaitu Kampus, Kampung Keprajon, Kraton maupun Komunitas. Ini menjadi bagian yang kuat apabila 5K tersebut menjadi bagian sinergi yang betul-betul luar biasa mendasari pada potensi yang ada di tingkat lapangan," kata Aris.

Adapun dalam acara 'Mangayubagya 34 Tahun Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X' akan digelar Dialog Keistimewaan bertema 'Membangun Yogya dengan Filosofi' menampilkan narasumber Aris Eko Nugroho SP Msi (Paniradya Pati Kaistimewaan DIY), Dr Timbul Raharjo MHum (Rektor ISI terpilih), Dr Supadmo MHum (Direktur Akademi Komunitas Seni Budaya Yogyakarta) dan Dr Kuswarsanto MHum (Dosen Seni Tari) dengan moderator Wiji Rachmadani.

Acara yang akan dipandu MC Agus Sunandar dan Alit Jabang Bayi ini juga menampilkan Beksan Menak dan karawitan serta pemutaran video dokumenter '34 Tahun Jumenengan Sultan HB X'. (Wan)

Wamenkeu Sambungan hal 1

Soal unggahan foto itu yang terlihat pamer, pejabat Bea Cukai tersebut mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki kelakuannya.

Kemudian tentang unggahan foto di akun media sosial bersama motor besar, ia

mengaku motor tersebut merupakan pinjaman.

Sementara Pahala menegaskan, pemanggilan terhadap Eko akan diklarifikasi seputar harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN miliknya. (Full)-f

BIRO TATA PEMERINTAHAN PEMDA DIY ADAKAN SOSIALISASI

Penting, Tertib Administrasi Kependudukan



Para peserta sosialisasi administrasi kependudukan oleh Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY di Sentolo, Kulonprogo. KR-Antri Yudiansyah



Anggota DPRD DIY, Rany Widayati saat memaparkan materi dalam sosialisasi administrasi kependudukan oleh Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY di Sentolo, Kulonprogo. KR-Antri Yudiansyah

gerakan Indonesia sadar adminduk yang saat ini tengah digencarkan. "Urusan Adminduk bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dalam semua pelayanan," tegas Aspiyah kepada peserta yang sebagian besar merupakan penggerak PKK.

Aspiyah menambahkan salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi Lakonku yang bisa diakses di Playstore untuk memberikan kemudahan akses bagi warga Kulonprogo melalui *smartphone*. Selain itu Disdukcapil Kulonprogo jempit bola pelayanan dan membuat inovasi Sekolah Ramah Administrasi Kependudukan (Semanak). "Kami mendorong warga terkait kepemilikan KK, KTP, KIA dan akta-akta penting juga pemutahiran data kependudukan," sambungnya.

Inovasi kependudukan lainnya seperti *one day service* untuk akta kelahiran, bela akta (begitu lahir akta kudapat) bekerja sama dengan RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang (NAS), Puskesmas yang melayani persalinan dan RS Swasta. Sedati (sekali datang dapat tiga) untuk pelayanan akta kematian, kacar kucur (perkawinan lancar dokumen meluncur) yakni pelaporan atas peristiwa perkawinan, kado nikah yang merupakan pelayanan bagi penduduk musim kerjasama dengan Kemenag Kulonprogo serta banyak inovasi pelayanan lainnya.

Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu mengatakan, masyarakat masih banyak yang memaham bahwa identitas kependudukan hanya untuk orang dewasa, padahal anak juga perlu memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). KIA ini sebagai identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri.

"Sosialisasi tentang KIA ini juga perlu terus digencarkan. Di setiap padukuhan perlu juga dibentuk kader adminduk yang memang dipersiapkan khusus untuk mengedukasi masyarakat agar tertib administrasi penduduk. Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk memastikan warga DIY tertib administrasi kependudukan," katanya. Sosialisasi di Kalurahan Caturtunggal diikuti para dukuh, perwakilan Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Susmiarto mengatakan, semua Warga Negara Indonesia harus memiliki identitas kependudukan. Jika menemukan ada warga yang belum memiliki identitas kependudukan, maka harus segera dilaporkan.

"Kalau orangnya sehat, cukup diberi pengantar RT, RW, Dukuh, Kalurahan sampai Kecamatan, nanti akan kita cek apakah orang itu betul-betul belum punya identitas, atau pernah punya. Tapi kalau untuk warga lansia, sakit berat, disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa, kami punya program inovasi jempit bola yang namanya 'Jelita Jiwa', tim kami akan datang ke rumah-rumah," katanya.

"Kami minta pak dukuh untuk membantu mengidentifikasi warganya, terutama penduduk-penduduk non permanen untuk dilakukan identifikasi. Intinya untuk memastikan. Tidak boleh ada orang yang hidup di suatu rumah

tanpa atau satu permukiman yang tidak punya identitas kependudukan," imbuhnya.

Carik Kalurahan Caturtunggal, Aminudin Azis mewakili Lurah Caturtunggal mengapresiasi sosialisasi terkait aturan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY. Menurutnya, meskipun sosialisasi serupa sering diadakan, namun selalu ada hal yang baru terkait adminduk, sehingga penting untuk diketahui. "Setelah mendapatkan sosialisasi, diharapkan peserta menyampaikannya ke masyarakat bawah, sehingga teredukasi," katanya. (Yud/Dev)



Para peserta sosialisasi administrasi kependudukan oleh Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY di Balai Kalurahan Caturtunggal. KR-Devid Permana



Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu memaparkan materi sosialisasi. KR-Devid Permana

MENINGKATKAN kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan, Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY menggelar sosialisasi selama dua hari di lokasi berbeda. Kamis (2/3) sosialisasi berlangsung di Kantor Kapanewon Sentolo, Kulonprogo, sedang Jumat (3/3) di Balai Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman.

Di Kantor Kapanewon Sentolo, Kulonprogo, hadir sebagai narasumber, Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Rany Widayati dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, Aspiyah. Sementara di Balai Kalurahan Caturtunggal, narasumber yakni Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Susmiarto. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

Rany Widayati mengatakan pentingnya masyarakat untuk melengkapi semua administrasi kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, akta perceraian dan kelengkapan lainnya. Apalagi saat ini kelengkapan administrasi tersebut dibutuhkan dalam banyak hal. "Semua harus punya dan dilengkapi, karena ini penting. Kemanapun dan dimanapun, hal itu sangat dibutuhkan," tegas Rani.

Mendukung kelengkapan administrasi warga Kulonprogo, Kepala Disdukcapil Kulonprogo, Aspiyah mengatakan berbagai inovasi dilakukan Disdukcapil Kulonprogo untuk memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengurus administrasi kependudukan. Inovasi penting, demi terwujudnya